ASAS REBUS SIC STANTIBUS DALAM HAL TERJADI FLUKTUASI NILAI TUKAR RUPIAH PADA PERJANJIAN JASA

Ardiansyah

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, ardiansyah@borneo.ac.id

ABSTRAK

Asas *rebus sic stantibus* merupakan asas dalam hukum perjanjian internasional yang memungkinkan peninjauan ulang isi perjanjian dan pengubahan ketentuan-ketentuan yang ada ketika terjadi perubahan situasi yang mendasar. Namun, dalam konteks perjanjian jasa di mana terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing Amerika Serikat, penggunaan asas *rebus sic stantibus* tidak dapat diterapkan sebagai pengecualian terhadap asas *pacta sunt servanda* yang mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Asas *rebus sic stantibus* hanya dapat diterapkan sebagai pengecualian terhadap asas *pacta sunt servanda* dalam konteks perjanjian-perjanjian internasional. Dalam konteks ini, asas *rebus sic stantibus* digunakan sebagai landasan untuk meninjau ulang isi perjanjian ketika terjadi perubahan yang signifikan dan tidak terduga dalam situasi politik, ekonomi, atau sosial yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian tersebut.

Kata Kunci: Asas *Rebus Sic Stantibus*, Asas *Pacta Sunt Servanda*, Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah.

PENDAHULUAN

Perjanjian yang melahirkan suatu perikatan (*verbinten*) hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban,¹ suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.² Pengertian perjanjian itu diperjelas Sudikno Mertokusumo sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum,³ dengan demikian perjanjian merupakan kesesuaian kehendak antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian melakukan jasa bermuara, pada sistem terbuka (*open system*) atau asas kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*) bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang.⁴ Baik untuk menentukan isi, bentuk dan hukumnya dalam membuat suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Adagium semua perjanjian mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya *pacta sunt servanda*, lazimnya dari pencantuman adagium tersebut disimpulkan adanya penganutan asas kebebasan berkontrak bahwa pencatuman adagium tersebut diperlukan demi untuk peningkatan kepastian Hukum,⁵ asas *pacta sunt servanda* menurut Grotius salah satu asas hukum yang terpenting, karena berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak seperti ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara,⁶ manakala perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, suatu perjanjian yang sah tidak dapat ditarik atau diubah secara sepihak, kecuali ada alasan yang

¹ Subekti, 1988, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 2.

² H.P Panggabean, 2010, *Penyalagunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)* sebagai alasan baru untuk Pembatalan Perjanjian, Liberty Edisi Revisi II, Yogyakarta, hlm. 11.

³ *Ibid.*, hlm. 12.

⁴ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 84.

⁵ Subekti, 1988, *Op.Cit*, hlm. 8.

⁶ H.P Panggabean, *Op.Cit*, hlm. 7.

cukup untuk itu berdasarkan undang-undang misalnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Asas itikad baik dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun yang dimaksud dengan asas itikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.⁸ Selain asas itikad baik, dikenal asas *rebus sic stantibus* bahwa perjanjian hanya mengikat jika keadaan pada saat pelaksanaan perjanjian sama dengan keadaan pada saat perjanjian dibuat.⁹ Hubungan antara asas itikad baik dengan asas *rebus sic stantibus* sangatlah erat, manakala jika terjadi perubahan keadaan yang sifatnya mendasar dari suatu perjanjian, juga sekaligus menerapkan asas itikad baik.

Asas *rebus sic stantibus* dapat mempengaruhi berlangsungnya suatu perjanjian, karena sekalipun sudah ada kesepakatan dan kesepakatan tersebut dibuat secara sah dan berlaku sebagai Undang-Undang serta mengikat bagi mereka yang membuatnya *pacta sunt servanda*, baik pada tahapan pemenuhan (*performance of contract*) maupun pada tahap pelaksanaan perjanjian (*implementation of contract*). Namun dalam penerapannya terdapat perubahan keadaan yang bertentangan dengan harapan atau ekspektasi para pihak, sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan maksud dari perjanjian tersebut. Hal ini menyebabkan perjanjian dapat berakhir (atau disesuaikan) apabila situasi berubah, Pengecualian ini kemudian melahirkan doktrin asas *rebus sic stantibus*.¹⁰

Memburuknya perekonomian Indonesia terlihat dari fluktuasi nilai tukar rupiah atas mata uang asing Amerika Serikat dan mempengaruhi usaha-usaha, termasuk usaha biro perjalanan haji yang berakibat pada pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, termasuk naiknya akomodasi biaya-biaya haji. Kenaikan biaya haji dikarenakan kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Pemerintah Arab Saudi sebesar 5 persen, Pajak Pemerintah Daerah (baladiyah) sebesar 5 persen, dan kenaikan bahan bakar minyak di Arab Saudi mencapai 180 persen, dipengaruhi juga kenaikan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.¹¹

Asas-asas perjanjian sangatlah perlu dikaji ulang, sehingga lebih mudah memahaminya sebagai ketentuan Undang-Undang mengenai sahnya suatu perjanjian. Suatu perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan Undang-Undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkenaan.¹² Nieuwenhuis menjelaskan hubungan fungsional antara asas-asas hukum dengan peraturan-peraturan hukum (*rechtsregel*). Pertama bahwa asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun suatu sistem, karena asas-asas itu bukan hanya mempengaruhi hukum positif tetapi juga didalam banyak keadaan menciptakan suatu sistem. Suatu sistem tidak akan ada, tanpa adanya asas-asas itu. Kedua, bahwa asas-asas hukum itu membentuk satu sama lain suatu sistem, asas-asas sering menunjuk kearah yang berlawananan, apa yang kiranya merupakan rintangan bagi peraturan-peraturan hukum, oleh karena menunjuk kearah yang berlawananan asas-asas itu saling kekang mengekang dan dengan demikian seimbang.¹³

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder yang difokuskan pada salah satu macam jenis, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,

⁷ Suharnoko dan Lita Arijati, Tanpa Tahun, *Hukum Perdata Materil dan Formil : Hukum Perikatan*, hlm. 275.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Suherman, 2017, *Perkembangan Asas Rebus Sic Stantibus (Perubahan keadaan yang fundamental) dalam Hukum positif di indonesia*, Jurnal Yuridis, UPN Veteran, Jakarta, hlm. 1-2 Diakses dari <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/167>, Pada Tanggal 20 Maret 2019, Pukul 19.21 WIB.

¹¹ Tirto.Id, 2018, *Biaya Ibadah Haji 2018 Naik Rp345.290*, diakses dari, <https://tirto.id/biaya-ibadah-haji-2018-naik-rp345290-cF3s> Pada Tanggal 7 April 2019, Pukul 15.51 WIB.

¹² H.P Panggabean, *Op.Cit*, hlm. 9.

¹³ *Ibid.*

penelitian sejarah hukum dan Penelitian perbandingan hukum.¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto¹⁵ penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian deskriptif ini diharapkan dapat menggambarkan suatu keadaan tertentu yang terjadi di lapangan.

PEMBAHASAN

Perkembangan Asas *Rebus Sic Stantibus*

Sejak abad XII dan XIII ahli-ahli hukum kanonik telah mengenal asas *rebus sic stantibus* yang dalam bahasa latinnya diungkap sebagai “*contractus qui habent tractum succesivum et deperitiam de future rebus sic stantibus intelliguntur*”, yang artinya bahwa perjanjian menentukan perbuatan selanjutnya untuk melaksanakannya pada masa yang akan datang harus diartikan tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap sama.¹⁶

Asas *rebus sic stantibus* pertama kali diterapkan oleh peradilan keagamaan. Diterapkannya asas *rebus sic stantibus* oleh peradilan keagamaan karena situasi yang terjadi pada waktu itu adanya pemisahan antara urusan gereja dengan urusan negara, dan ini merupakan salah satu karakteristik penting kode Napoleon. Selanjutnya asas *rebus sic stantibus* diadopsi oleh pengadilan lain dan para ahli hukum. Asas ini kemudian telah diterima secara luas pada akhir abad XIII. Dalam perkembangannya keberadaan asas *rebus sic stantibus* mendapat dukungan dari beberapa ahli dan pendapat para ahli telah membantu eksistensi asas *rebus sic stantibus* dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Machiavelli bahwa segala sesuatu tergantung pada keadaan-keadaan yang kebetulan berlaku pada suatu waktu yang dihadapi oleh penguasa negara. Sikap Machiavelli yang demikian tentunya tidak jauh dari makna yang terkandung dalam asas *rebus sic stantibus*. Demikian juga Alberico Gentili menyatakan bahwa, yang paling penting atas hukum traktat ialah dalil bahwa perjanjian (perdamaian) selalu mengandung syarat tersimpul, yaitu bahwa traktat hanya mengikat selama kondisi-kondisinya tidak berubah. Jelaslah bahwa yang dimaksud syarat tersimpul oleh Alberico Gentili adalah asas *rebus sic stantibus*.¹⁷

Lain hal dengan Bynkershoek dalam salah satu karyanya yang berkaitan dengan traktat, walau pada awalnya ia menolak asas *rebus sic stantibus*, namun pada kesempatan lain justru menyarankan kepada penguasa berdaulat untuk melepaskan diri dari suatu janji-janji, bilamana ia tidak lagi mempunyai kekuasaan untuk mentaati janji-janji tersebut. Ditegaskan pula oleh Bierly, bahwa dalam suatu perjanjian internasional ada tersirat suatu syarat tambahan yang menentukan bahwa perjanjian itu hanya mengikat selama keadaan-keadaan masih seperti semula. Kata-kata yang dicantumkan dalam perjanjian merupakan hasil kesepakatan diantara para pihak namun mengandung suatu syarat, yaitu apabila tidak terjadi suatu perubahan keadaan yang penting maka hilanglah syarat berlakunya perjanjian dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi.¹⁸

Pengaturan Asas *Rebus Sic stantibus*

Perubahan keadaan yang fundamental (*fundamental change of circumstance*) atau lebih dikenal dengan asas *rebus sic stantibus* yang diatur dalam *Vienna Convention On The Law Of Treaties 1969, article 62*. Bunyi Pasal 62 Ayat (1) :¹⁹

¹⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 33.

¹⁶ Harry Purwanto, 2011, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian internasional*, hlm. 109 diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16160/10706>, Pada tanggal 8 April 2019, Pukul 16.31 WIB.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 110.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Vienna Convention On The Law Of Treaties 1969, Article 62 Fundamental change of circumstance*

A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the parties, may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from the treaty unless:

- (a) The existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to be bound by the treaty; and*
- (b) The effect of the change is radically to transform the extent of obligations still to be performed under the treaty.*

Pasal 62 Ayat (1) membatasi perubahan keadaan yang fundamental ini dengan dua pembatasan yang harus dipenuhi. *Pertama* pembatasan berdasarkan waktu terjadinya, yakni terjadinya haruslah pada waktu dilakukan perundingan perjanjian, tegasnya pada waktu dilakukan perundingan untuk merumuskan naskah perjanjian. Jadi bukan perubahan keadaan yang terjadinya sesudah berlaku atau sesudah dilaksanakannya perjanjian tersebut. Jika terjadinya pada waktu sesudah mulai berlaku atau ketika perjanjian sedang dalam pelaksanaannya, sehingga berpengaruh besar terhadap perjanjian tersebut, hal ini termasuk dalam kategori ketidakmungkinan untuk melaksanakannya. *Pembatasan yang kedua*, adalah pembatasan yang sifatnya subjektif, yakni perubahan keadaan itu tidak dapat diduga atau diprediksi sebelumnya oleh para pihak. Meskipun kedua syarat atau pembatasan ini terpenuhi, masih belum dapat begitu saja dijadikan sebagai alasan untuk mengakhiri eksistensi suatu perjanjian internasional.²⁰ Sehingga harus memenuhi kualifikasi yang lebih spesifik lagi, diantaranya :

- a. Adanya keadaan tersebut merupakan dasar yang esensial bagi para pihak untuk terikat pada perjanjian;
- b. Akibat atau efek dari perubahan keadaan itu menimbulkan perubahan yang secara radikal terhadap luasnya kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut.

Pasal 62 ayat (2), ada dua larangan untuk menggunakan perubahan keadaan yang fundamental sebagai alasan untuk mengakhiri suatu perjanjian internasional.

*A fundamental change of circumstances may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from a treaty:*²¹

- (a) if the treaty establishes a boundary; or*
- (b) if the fundamental change is the result of a breach by the party invoking it either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty.*

Pertama, negara peserta tidak boleh menggunakan klausul ini sebagai alasan untuk mengakhiri suatu perjanjian tentang garis batas wilayah negara. Kedua, klausul ini juga tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengakhiri suatu perjanjian internasional, jika perubahan keadaan yang fundamental ini terjadi sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atas ketentuan perjanjian internasional.²²

Penggunaan kata-kata *rebus sic stantibus* tidak nampak dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969. Hal ini nampaknya dihindari oleh *Internatonal Law Commission*, dengan maksud untuk menekankan sifat objektif dari ketentuan yang ada dan juga guna menghindarkan implikasi doktriner dari istilah tersebut. Sebagaimana juga dikemukakan oleh D.J. Harris, bahwa Komisi Hukum Internasional dalam sidangnya yang ke XVIII tahun 1966 menolak teori yang tersirat tentang klausul *rebus sic stantibus* itu, dan lebih suka mendasarkan pada doktrin “perubahan keadaan yang fundamental” (*fundamental change of circumstance*) dengan alasan persamaan derajat dan keadilan serta membuang kata-kata *rebus sic stantibus*, karena menimbulkan akibat-

²⁰ I Wayan Parthiana, 2005, *Hukum Perjanjian Internasional bagian 2*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 469.

²¹ *Vienna Convention On The Law Of Treaties 1969, Loc.Cit.*

²² I Wayan Parthiana, *Op.Cit.*, hlm. 472.

akibat yang tidak diinginkan. Oleh karena itu pada akhirnya makna yang terkandung dalam asas *rebus sic stantibus* oleh Konvensi Wina dirumuskan dengan menggunakan istilah *fundamental change of circumstance* (perubahan fundamental atas suatu keadaan). Bahkan oleh Mahkamah Internasional, dalam kasus *fisheries jurisdiction*, dikatakan bahwa keberadaan asas *rebus sic stantibus* dalam Pasal 62 tersebut hanyalah bersifat merumuskan hukum kebiasaan.²³

Apa yang dimaksud dengan perubahan keadaan yang fundamental (*fundamental change of circumstances*), sama sekali tidak ada penegasannya di dalam Konvensi Wina. Tiadanya penegasan ini dapat diartikan, bahwa penentuannya diserahkan pada praktek negara-negara ataupun pada putusan badan penyelesaian sengketa jika menghadapi kasus yang berkaitan dengan ada atau tidak adanya perubahan harus ditentukan secara kasus per kasus. Sebagai contoh, terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang mula-mula melanda satu negara dan kemudian dalam tempo yang relatif singkat merembet ke negara-negara lainnya, sehingga mengakibatkan merosotnya perekonomian negara-negara yang bersangkutan dan hal ini ternyata tidak dapat diduga atau diprediksi sebelumnya oleh negara-negara tersebut, apakah bisa disebut sebagai perubahan keadaan yang fundamental ?, mungkin ada beraneka macam pendapat yang muncul yang berbeda bahkan bertentangan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, dalam hal inilah para pihak maupun badan penyelesaian sengketa yang menghadapi suatu kasus yang berkaitan dengan perubahan keadaan yang fundamental, harus dapat menentukan dengan penuh kearifan.²⁴

The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC) merupakan salah satu upaya harmonisasi hukum atau pengaturan dalam hukum kontrak internasional. Indonesia telah meratifikasinya melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008. Dalam UNIDROIT ini juga mengatur tentang asas *pacta sunt servanda* dan asas *rebus sic stantibus*, akan tetapi istilah untuk asas *rebus sic stantibus* ini adalah dengan *hardship clauses* (klausul kesulitan). Berdasarkan prinsip UNIDROIT mengikatnya suatu kontrak (prinsip asas *pacta sunt servanda*) tidak bersifat mutlak apabila terjadi kesulitan (*hardship*). Hal ini terjadi apabila memang adanya perubahan yang fundamental atas keseimbangan dari kontrak yang menyebabkan kesulitan bagi salah satu pihak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya pada saat kontrak ditanda tangani oleh para pihak.²⁵ Menurut William C. Dennis dan Joseph P. Chamberlain jika terjadi perubahan keadaan mendasar dan esensial yang mengakibatkan diluar kehendak dari para pihak maka dapat dilakukan interpretasi dengan itikad baik (*good faith*), argumentasi (*argument*).²⁶

An agreement, in the nature of things, cannot be absolutely unchange able, forever. If there is a fundamental, essential change in the circum stances, not specifically contemplated by the parties, or inferentially or reasonably within their expectation, then I submit that in the nature of things they are released from their obligations. Interpretation of the rule is a matter of good faith, of argument, of reason, but the essence is there. (garis bawah penulis).

Hingga saat ini, istilah yang sepadan dengan asas *rebus sic stantibus* tersebar dalam banyak pemahaman. Semisal *wegfall der geschäftsgrundlage* di Jerman, *imprevisio* di Perancis, *frustration of contract* di Inggris (*only partly covering the hardship situation*) atau *Impracticability* di Amerika. Meskipun pada tataran teoritis dan praktis terdapat perbedaan yang tegas, namun pada intinya sama.²⁷

²³ Harry Purwanto, *Op.Cit*, hlm. 112.

²⁴ *Ibid*, hlm. 468.

²⁵ Suherman, *Op.Cit*, hlm. 7.

²⁶ William C. Dennis dan Joseph P. Chamberlain, 1932, *The doctrine of rebus sic stantibus*, Vol. 26 (April 28-30, 1932), pp. 53-68, Cambridge University Press. Sumber <https://www.jstor.org/stable/25656837>, Diakses pada tanggal 19 desember 2019, Pukul 22.30 WIB.

²⁷ Rahman, Taufik El, 2019, *Berlakunya Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Kontrak- Kontrak Berdimensi Publik Di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta hlm. 17.

Penerapan Asas *Rebus Sic stantibus* dalam hal terjadi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah pada perjanjian melakukan jasa

Pada prakteknya penerapan asas *rebus sic stantibus* diterapkan dalam hukum perjanjian internasional.²⁸ Penggunaan asas tersebut pada umumnya dicantumkan secara tegas dalam konteks perjanjian-perjanjian internasional yang melibatkan unsur negara dengan negara sebagai para pihaknya. Hukum perjanjian di Indonesia belum mengatur klausul *rebus sic stantibus* sebagai norma, akan tetapi menempatkan sebagai asas hukum. Klausul tersebut secara praktis maupun teoritis tidak dapat digunakan untuk menyimpangi daya ikat suatu perjanjian. Namun dalam hukum internasional, semisal perjanjian internasional, dimungkinkan saja pemberlakuan asas tersebut. Kendati beberapa sistem hukum telah menerapkan dan mengadopsi asas tersebut kedalam sistem hukum perjanjiannya.²⁹ Berdasarkan hemat penulis, bahwa penerapan asas *rebus sic stantibus* sebagai pengecualian terhadap asas *pacta sunt servanda* hanya dapat diterapkan dalam perjanjian-perjanjian internasional, seperti yang telah dikemukakan Taufik El Rahman, belum diaturnya didalam KUHPerdara sehingga menjadi tidak tepat untuk diterapkan dalam perjanjian-perjanjian di Indonesia khususnya dalam perjanjian melakukan jasa jika terjadi perubahan keadaan yang mendasar.

Seiring waktu, asas *Rebus Sic Stantibus* semakin diakui sebagai mekanisme proteksi terhadap perubahan kondisi yang sangat mendasar dan tidak dapat diprediksi pada saat perjanjian-perjanjian dibuat, seperti perang antar negara, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan *Covid-19* yang sangat berdampak dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Namun, penerapan asas ini tetap memerlukan pertimbangan yang matang dan hati-hati, karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan keraguan dalam pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat.

PENUTUP

Asas *rebus sic stantibus* dalam hal terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing Amerika Serikat tidak dapat diterapkan sebagai pengecualian asas *pacta sunt servanda*. Penggunaan asas *rebus sic stantibus* sebagai pengecualian terhadap asas *pacta sunt servanda* hanya dapat diterapkan dalam konteks perjanjian-perjanjian internasional publik, negara dan yang bukan negara sebagai para pihak. Belum diaturnya di dalam KUHPerdara sehingga menjadi tidak tepat untuk diterapkan dalam konteks perjanjian melakukan jasa atau perjanjian lingkup nasional. penerapan asas ini tetap memerlukan pertimbangan yang matang dan hati-hati, karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan keraguan dalam pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
H.P Panggabean, 2010, *Penyalagunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)* sebagai alasan baru untuk Pembatalan Perjanjian, Liberty Edisi Revisi II, Yogyakarta.
I Wayan Parthiana, 2005, *Hukum Perjanjian Internasional bagian 2*, Mandar Maju, Bandung.
Rahman, Taufik El, 2019, *Berlakunya Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Kontrak-Kontrak Berdimensi Publik Di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

²⁸ Vienna Convention on the Law of International Treaties 1969. Article 62 of the Vienna Convention states that "a very fundamental change of circumstances which occurs after the signing of a treaty, and which is not anticipated by the parties, may be grounds for either party to request the revision or annulment of the treaty".

²⁹ Taufik El Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 18.

- Subekti, 1988, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suharnoko dan Lita Arijati, Tanpa Tahun, *Hukum Perdata Materil dan Formil : Hukum Perikatan*, Yogyakarta.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

SUMBER LAIN:

- Harry Purwanto, 2011, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian internasional*, hlm. 109 diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16160/10706>, Pada tanggal 8 April 2019, Pukul 16.31 WIB.
- Suherman, 2017, *Perkembangan Asas Rebus Sic Stantibus (Perubahan keadaan yang fundamental) dalam Hukum positif di indonesia*, Jurnal Yuridis, UPN Veteran, Jakarta, hlm. 1-2 Diakses dari <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/167>, Pada Tanggal 20 Maret 2019, Pukul 19.21 WIB.
- Tirto.Id, 2018, *Biaya Ibadah Haji 2018 Naik Rp345.290*, diakses dari, <https://tirto.id/biaya-ibadah-haji-2018-naik-rp345290-cF3s> Pada Tanggal 7 April 2019, Pukul 15.51 WIB.
- Vienna Convention On The Law Of Treaties 1969*
- William C. Dennis dan Joseph P. Chamberlain, 1932, *The doctrine of rebus sic stantibus*, Vol. 26 (April 28-30, 1932), pp. 53-68, Cambridge University Press. Sumber <https://www.jstor.org/stable/25656837>, Diakses pada tanggal 19 desember 2019, Pukul 22.30 WIB.